

## RESILIENSI KOMUNITAS MISKIN DI PEDESAAN MENGHADAPI PANDEMI COVID-19 (Kasus: Kampung Nyalindung, Desa Sukamantri, Kabupaten Bogor)

*Resilience of Rural Communities Facing the Covid-19 Pandemic (Case:  
Nyalindung Village, Sukamantri District, Bogor)*

Kintan Ayu Septiani Hidayat\*) dan Nurmala K. Pandjaitan

Departemen Sains Komunikasi Pengembangan Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia,  
Institut Pertanian Bogor

\*)e-mail: [kintankalifa@gmail.com](mailto:kintankalifa@gmail.com)

Diterima: 26-08-2021 | Disetujui: 30-08-2021 | Publikasi online: 06-10-2021

### ABSTRACT

*The Covid-19 pandemic that has occurred since the beginning of 2020 until now has had a negative impact on health, social and economy. Facing the disruption caused by this disaster, the community must be able to adapt in order to survive, especially the poor who are a vulnerable group. The poor community is a community that is powerless and has economic limitations. The big threat due to this pandemic is to increase poverty due to economic shocks and restrictions on activities. The purpose of this research is to examine the resilience of rural poor communities to face pandemics in terms of adaptive capacity and community collective action. The method used is a survey using a questionnaire instrument, observation, and in-depth interviews. Selection of respondents using a random sampling technique and obtained a sample of 40 respondents. The results showed that the resilience of poor rural communities was not developed because the community was unable to adapt to the pandemic and there was no collective effort to overcome common problems during the pandemic. Communities tend to rely on external assistance and support from outside the community to survive the Covid-19 pandemic.*

**Keywords:** *Adaptation capacity, Collective action, Community resilience*

### ABSTRAK

Pandemi Covid-19 yang terjadi sejak awal tahun 2020 sampai saat ini memberikan dampak buruk bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Menghadapi gangguan akibat bencana ini komunitas harus mampu beradaptasi agar dapat bertahan hidup, terutama komunitas miskin yang merupakan kelompok rentan. Komunitas miskin merupakan komunitas yang tidak berdaya serta memiliki keterbatasan ekonomi. Ancaman besar akibat pandemi ini ialah akan meningkatkan kemiskinan akibat guncangan ekonomi dan pembatasan aktivitas. Tujuan penelitian ini akan mengkaji ketahanan komunitas miskin di pedesaan menghadapi pandemi yang ditinjau melalui kapasitas adaptasi dan tindakan kolektif komunitas. Metode yang digunakan adalah survei menggunakan instrumen kuesioner, observasi, dan wawancara mendalam. Pemilihan responden menggunakan teknik sample random sampling dan didapatkan sample sebanyak 40 responden. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketahanan komunitas miskin di pedesaan tidak terbangun karena komunitas tidak mampu beradaptasi dalam menghadapi pandemi dan tidak adanya upaya kolektif yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan bersama selama pandemi. Komunitas cenderung mengandalkan bantuan dan dukungan eksternal dari pihak luar komunitas untuk bertahan menghadapi pandemi Covid-19.

**Kata Kunci:** Kapasitas adaptasi, Aksi kolektif, Resiliensi komunitas



Content from this work may be used under the terms of the Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International. Any further distribution of this work must maintain attribution to the author(s) and the title of the work, journal citation and DOI.



## PENDAHULUAN

Sejak Desember 2019 dikabarkan terdapat sebuah virus baru yang menginfeksi paru-paru dan penyebarannya sangat cepat yang berasal dari Kota Wuhan, Provinsi Hubei, China. Pemerintah China maupun organisasi kesehatan dunia tanggap menyelidiki mengenai virus baru tersebut. Hingga pada tanggal 12 Januari 2020, *World Health Organization* (WHO) mengumumkan secara tentatif virus baru tersebut dinamai *2019 novel coronavirus* (2019-nCoV) dan menyerukan bahwa virus tersebut menjadi darurat kesehatan masyarakat, tentunya hal tersebut sangat mengejutkan dan menjadi perhatian internasional (Sun *et al.* 2020). Secara resmi pada tanggal 11 Februari 2020, *International Classification of Diseases* (ICD) mengumumkan penyakit tersebut diberi nama *Coronavirus Disease* (COVID-19) dengan penyebab virus *Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2* (SARS-CoV-2) yang diumumkan *International Committee on Taxonomy of Viruses* (ICTV). Menurut ICTV, virus ini masih berkaitan dengan wabah SARS pada tahun 2003 karena kesamaan genetik virus (World Health Organization 2020).

Penyebaran virus corona ini sangat cepat sehingga dalam kurun waktu beberapa bulan dapat menyebar ke seluruh negara di belahan dunia. Pada tanggal 11 Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) menetapkan status pandemi global untuk penyakit Covid-19 dengan kasus terkonfirmasi positif 121.564 orang di 118 negara (The Johns Hopkins Coronavirus Resource Center 2020). Semakin hari jumlah kasus positif Covid-19 terus melonjak. Secara global per tanggal 1 November 2020 kasus terkonfirmasi positif Covid-19 mencapai 45.942.902 kasus termasuk didalamnya 1.192.644 kematian (World Health Organization 2020b). Adapun jumlah kasus positif Covid-19 di Indonesia dilansir dari website Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 1 November 2020 telah mencapai 412.784 kasus termasuk didalamnya 341.942 sembuh dan 13.943 kematian Covid-19 (Kemkes 2020).

Pemerintah Indonesia menetapkan melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 bahwa pandemi Covid-19 tergolong bencana non alam karena telah berdampak pada meningkatnya jumlah korban, kerugian harta benda, meluasnya cakupan wilayah yang terjangkit virus, serta menimbulkan implikasi pada aspek sosial ekonomi yang luas di Indonesia (Keppres Indonesia 2020). Melonjaknya kasus positif Covid-19 di Indonesia harus segera ditangani agar laju penyebaran mata rantai virus tidak semakin meluas.

Dalam mengurangi penyebaran virus, pemerintah Indonesia mengambil langkah dengan memberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dengan merujuk pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020. Kebijakan tersebut menuai pro dan kontra di kalangan masyarakat, karena dengan diberlakukannya kebijakan tersebut dapat membatasi aktivitas masyarakat sehingga tidak dapat berjalan normal.

Pandemi Covid-19 tidak hanya mengakibatkan krisis kesehatan, melainkan berdampak pada perekonomian global. Wabah Covid-19 memukul negara-negara berkembang pada saat mereka sedang berjuang dengan beban utang yang tidak berkelanjutan selama bertahun-tahun termasuk di dalamnya Indonesia yang tidak luput akan adanya kemungkinan terjebak pada bahaya defisit anggaran (Muhyiddin 2020). Dilansir dari penelitian yang dilakukan oleh Suryahadi *et al.* (2020), Bank Dunia memproyeksikan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2020 hanya akan mencapai 2,1%. Angka tersebut lebih rendah daripada pertumbuhan ekonomi pada 2019 sebesar 5%. Guncangan ekonomi di Indonesia akibat Covid-19 dimulai dari menurunnya produktivitas individu ataupun perusahaan yang didorong oleh pembatasan aktivitas fisik (*physical distancing*) ataupun PSBB. Guncangan terhadap penawaran (*supply*) yang akhirnya diikuti oleh guncangan terhadap permintaan (*demand*) konsumen akibat diberlakukannya PSBB seperti penutupan sebagian besar pusat perbelanjaan/pusat bisnis serta pembatasan transportasi umum. Hal tersebut berakibat kepada banyaknya tenaga kerja yang kehilangan pekerjaannya.

Dikutip dari berita harian Kompas.com (21/7), Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan, hingga Juli 2020, jumlah tenaga kerja yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) maupun dirumahkan mencapai 3,5 juta pekerja. Dengan rincian, pekerja formal yang dirumahkan mencapai 1,1 juta orang, pekerja formal yang terkena PHK mencapai 380.000 orang, dan pekerja informal yang terkena dampak mencapai 630.000 orang (Ridho 2020). Realitas tersebut melahirkan banyak pengangguran baru selama masa pandemi Covid-19. Dampak pandemi Covid-19 pada aktivitas perekonomian diprediksi akan berlangsung cukup lama. Jika hal ini terus terjadi, guncangan ekonomi di Indonesia diprediksi akan mendorong munculnya orang miskin baru. Sebuah studi yang dilakukan

oleh Suryahadi *et al.* (2020) mengestimasi bahwa guncangan ekonomi akibat Covid-19 terhadap pertumbuhan ekonomi akan menaikkan tingkat kemiskinan dari 9,2% pada September 2019 ke 12,4% pada akhir 2020.

Dilansir dari berita harian *Republika.co.id* (25/6), Shinta Kamdani selaku Ketua *Indonesia Business Council for Sustainable Development* (IBCSO) mengatakan bahwa orang miskin baru diprediksi melonjak antara 1.1-3.78 juta orang dalam skenario berat dan lebih berat. Artinya, pandemi Covid-19 dapat memutarbalikkan tren penurunan angka kemiskinan dalam 9 tahun terakhir (Ridho 2020). Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat angka kemiskinan per Maret 2020 mengalami kenaikan menjadi 26,42 juta orang. Dilansir dari berita harian *Republika.co.id* (17/7), Dekan Fakultas Ekonomi dan Manajemen IPB University, Prof Dr. Nunung Nuryanto, ia mengatakan bahwa peningkatan jumlah penduduk miskin akibat Covid-19 paling banyak terjadi di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan Pulau Jawa memberikan kontribusi perekonomian sekitar hampir 60% terhadap Produk Domestik Bruto (Alamsyah 2020).

Peningkatan angka kemiskinan diproyeksikan terjadi di seluruh wilayah, baik desa dan kota. Peningkatan kemiskinan di kota mencapai 1,12% dari September 2019 yang berkisar 6.56% menjadi 7.38%. Adapun peningkatan di desa lebih landai dengan kisaran 0.22% dari 12.6% menjadi 12.82%. Namun, jika dilihat dari total jumlah penduduknya, daerah

pedesaan memiliki jumlah penduduk miskin paling banyak dibandingkan daerah perkotaan. BPS mencatat jumlah penduduk miskin di pedesaan per Maret 2020 mencapai 15.26 juta dan jumlah penduduk miskin di perkotaan sebanyak 11.16 juta orang. Hadirnya pandemi Covid-19 menyebabkan guncangan baru bagi penduduk miskin di pedesaan. Mengingat mereka sudah miskin dan akan menjadi semakin miskin akibat dampak dari pandemi. Kesulitan dan permasalahan yang dialami selama pandemi membuat mereka semakin rentan dan terancam.

Dalam menghadapi pandemi Covid-19, masyarakat harus mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Kemampuan beradaptasi dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki selama menghadapi bencana akan membangun ketahanan. Terlebih jika bencana menimpa suatu komunitas, maka komunitas perlu melakukan tindakan bersama agar dapat mengatasi perubahan yang terjadi akibat bencana. Jika hal tersebut dilakukan dengan baik maka komunitas akan mampu tahan (resilien) dan mencapai ketahanan atau yang disebut dengan resiliensi komunitas. Cutter *et al.* (2008) memaknai resiliensi komunitas sebagai kemampuan komunitas untuk merespons dan pulih dari bencana, mencakup kondisi-kondisi yang memungkinkan komunitas menyerap dampak dan mengatasi suatu peristiwa bahkan hingga pascaperistiwa. Resiliensi komunitas menekankan pada aspek adaptasi komunitas terhadap segala gangguan dan perubahan yang terjadi akibat bencana.

Pendapat yang sama diuraikan oleh Longstaff *et al.* (2010) yang mengatakan bahwa sumber daya yang dimiliki oleh komunitas dapat meningkatkan kapasitas suatu komunitas dalam beradaptasi terhadap suatu perubahan akibat terjadinya bencana. Lebih lanjut, Longstaff *et al.* (2010) menguraikan kapasitas adaptasi ialah fungsi komunitas dalam menyimpan dan mengingat pengalaman (*institutional memory*), menggunakan memori dan pengalaman untuk belajar dan inovasi (*innovative learning*), dan terhubung dengan jejaring sosial di dalam dan luar komunitas (*connectedness*) untuk mengatasi kesulitan/kerugian akibat bencana. Hingga pada akhirnya, membangun resiliensi komunitas merupakan sebuah gerakan bersama/kolektif untuk mencari solusi dari sebuah gangguan. Komunitas yang resilien mampu beradaptasi dengan keseimbangan baru dengan memulihkan fungsi seperti sebelum adanya bencana. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengkaji lebih lanjut mengenai resiliensi komunitas di pedesaan dalam menghadapi pandemi Covid-19.

## **METODE PENELITIAN**

Lokasi penelitian dilakukan di RT 01/03 Kampung Nyalindung, Desa Sukamantri. Kampung Nyalindung merupakan wilayah yang secara administratif termasuk ke dalam RW 03 Desa Sukamantri yang menghimpun lima RT. Adapun pemilihan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) dengan pertimbangan: (1) Berdasarkan hasil sensus desa, RT 01 merupakan wilayah paling banyak yang memiliki warga dengan kategori lapisan menengah ke bawah yaitu 25 KK dari 47 KK. Sedangkan jumlah warga dengan kelas menengah ke bawah lainnya: RT 02(32KKdari56KK),RT03(43KKdari78KK), RT04(28KKdari61KK),danRT05(27KKdari51 KK). (2) berdasarkan hasil sensus dan observasi lapang, warga di RT 01/03 Kampung Nyalindung digambar

dengan kondisi rata-rata warga tidak ikut BPJS, penggunaan listrik 450W, pendapatan di bawah UMR, serta hasil observasi lapang kondisi rumah warga kecil, tidak ada MCK, rapat berdekatan, dan tidak ada halaman. (3) dipilih hanya satu RT dengan pertimbangan jarak lokasi, rendah atau tingginya interaksi serta kohesivitas warga.

Metode penelitian yang digunakan ialah observasi, survei, dan wawancara. Observasi bertujuan untuk mengamati perilaku masyarakat selama pandemi Covid-19. Survei dilakukan dengan membagikan kuesioner kepada individu mewakili keluarga. Adapun wawancara dilakukan kepada informan, seperti ketua RT, kepala desa, dan tokoh masyarakat. Pemilihan responden menggunakan teknik *sample random sampling* terpilih 40 responden dengan kriteria responden (1) warga RT 01/03 Kampung Nyalindung, Desa Sukamantri, dengan rentang usia 21-65 tahun dan (2) memiliki pendapatan dengan rentang Rp800,000 hingga Rp4.083.000. Kriteria usia didasarkan pada rata-rata usia warga RT 01/03 Kampung Nyalindung serta kondisi ideal warga mampu mengisi kuesioner serta menjawab pertanyaan dengan baik dan benar. Adapun kriteria pendapatan didasarkan pada UMR Kabupaten Bogor Tahun 2020 sebagai salah satu tolak ukur dalam melihat kemiskinan.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### Kapasitas Adaptasi

Kapasitas adaptasi merupakan kemampuan komunitas untuk beradaptasi terhadap perubahan (Longstaff *et al.* 2010). Dalam penelitian ini, komunitas di Kampung Nyalindung dihadapkan pada situasi akibat adanya pandemi Covid-19. Komunitas diharuskan untuk mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama pandemi, terutama pada aspek perekonomian dimana warga mengalami kesulitan ekonomi di masa pandemi.

Lebih lanjut, Longstaff *et al.* (2010) kemampuan beradaptasi komunitas diukur melalui pengalaman bersama (*institutional memory*) menghadapi bencana, (2) pembelajaran inovasi (*innovative learning*) yang dilakukan dengan dasar pengalaman bersama, dan (3) keterhubungan (*connectedness*) baik di dalam maupun luar komunitas.

*Institutional memory* adalah pengalaman bersama yang dimiliki komunitas berkaitan dengan (1) pengalaman pernah atau tidaknya mengalami kesulitan ekonomi, (2) pengetahuan penyebab kesulitan ekonomi, (3) pernah atau tidaknya mengalami kerugian akibat kesulitan ekonomi, (4) cara mengatasi kesulitan ekonomi, dan (5) tempat meminta bantuan ketika mengalami kesulitan ekonomi.

Hasil penelitian menunjukkan, rataan persentase pengalaman bersama (*institutional memory*) yang dimiliki komunitas adalah 78,5%. Angka tersebut didapatkan dengan menjumlahkan persentase dari setiap indikator *institutional memory* kemudian di bagi dengan jumlah total indikator. Rataan *institutional memory* termasuk ke dalam kategori tinggi. Dikatakan tinggi apabila rata-rata persentase lebih dari 70% dan rendah apabila kurang dari 70%. Tinggi nya *institutional memory*, menunjukkan bahwa komunitas memiliki kesamaan memori bersama dalam mengalami permasalahan kesulitan ekonomi di masa lampau. Memori bersama yang terdapat di komunitas

seperti pernah merasakan kesulitan ekonomi bersama, bangkrut nya usaha dan sepi nya konsumen yang dirasakan warga, cara mengatasi kesulitan ekonomi yang sama dengan membuka usaha warung, serta memiliki kesamaan dalam meminta bantuan yaitu kepada keluarga. Sayangnya, memori bersama yang dimiliki komunitas tidak dimanfaatkan dengan baik untuk atasi permasalahan kesulitan ekonomi di masa pandemi Covid-19.

Semenjak adanya pandemi Covid-19, cenderung warga di komunitas tidak mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi, warga di komunitas mengakui bahwa pandemi Covid-19 merupakan hal baru yang dialami sehingga mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengatasinya. Memori bersama di masa lampau tidak mampu mengatasi permasalahan yang cukup kompleks akibat pandemi.

Menurut Longstaff *et al.* (2010) dalam mengatasi permasalahan akibat bencana, komunitas dapat melakukan pembelajaran inovatif (*innovative learning*) sebagai solusi atasi masalah. Memori dan pengalaman bersama dalam menghadapi kesulitan ekonomi di masa lampau, dapat digunakan komunitas sebagai dasar untuk belajar, berinovasi, dan mereorganisasi sumber daya bagi komunitas untuk beradaptasi dengan tuntutan perubahan yang terjadi selama pandemi.

Pembelajaran inovatif (*innovative learning*) dapat diukur melalui (1) kegiatan sosial yang dilakukan bersama, (2) kegiatan ekonomi yang dilakukan bersama, (3) bidang dalam kegiatan ekonomi yang dilakukan bersama, (4) kepemilikan kegiatan ekonomi, dan (5) dampak dari kegiatan ekonomi bersama.

Berdasarkan hasil penelitian, rata-rata persentase tingkat *innovative learning* di komunitas hanya 10%. Angka tersebut didapatkan dengan menjumlahkan persentase dari setiap indikator *innovative learning* kemudian di bagi dengan jumlah total indikator. Rataan persentase *innovative learning* termasuk ke dalam kategori rendah. Dikatakan rendah apabila rata-rata persentase kurang dari 70% dan tinggi apabila lebih dari 70%.

Rendahnya tingkat *innovative learning* di komunitas karena warga tidak belajar dari pengalaman di masa lampau untuk atasi permasalahan kesulitan ekonomi selama pandemi Covid-19. Mereka tidak melakukan kegiatan inovatif untuk memecahkan masalah. Adapun kegiatan yang dilakukan warga di komunitas, hanya di bidang sosial dan itu pun tidak mampu mengatasi permasalahan komunitas selama pandemi Covid-19.

Tidak adanya usaha bersama yang dilakukan komunitas disebabkan berbagai faktor, seperti warga memiliki kesibukkan masing-masing, buruknya kepemimpinan dalam menggerak massa, warga cenderung tidak mau berembuk untuk mencari solusi, dan banyak warga yang tidak terlibat aktif di komunitas. Hal tersebut membuktikan bahwa komunitas tidak mampu belajar dari pengalaman/memori bersama di masa lampau ketika menghadapi permasalahan serupa, akibatnya mereka tidak mampu dalam mengatasi masalah ekonomi ketika terjadi pandemi Covid-19.

Lebih lanjut, Longstaff *et al.* (2010) menguraikan bahwa kemampuan komunitas dalam membangun keterhubungan (*connectedness*) di dalam maupun luar komunitas mampu membantu komunitas untuk beradaptasi terhadap perubahan akibat bencana. Keterhubungan (*connectedness*) dapat diukur melalui : (1) saling berbagi informasi antar warga, (2) diskusi untuk mengatasi permasalahan, (3) keterlibatan aktif di komunitas, (4) memberikan bantuan kepada sesama warga, (5) usaha pengajuan bantuan kepada pihak luar komunitas, dan (6) bantuan dari luar komunitas.

Hasil penelitian menunjukkan, rata-rata persentase tingkat *connectedness* komunitas adalah 52,5%. Angka tersebut didapatkan dari menjumlahkan setiap persentase dari setiap indikator *connectedness* kemudian di bagi dengan jumlah total indikator. Rataan persentase *connectedness* termasuk ke dalam kategori rendah. Dikatakan rendah apabila rata-rata persentase kurang dari 70% dan tinggi apabila lebih dari 70%.

Keterhubungan di dalam komunitas sudah terbangun dengan baik bahkan sebelum pandemi Covid-19. Namun, keterhubungan yang baik diantara warga tidak mampu membuat komunitas melakukan suatu gerakan untuk atasi permasalahan bersama selama pandemi, yakni kesulitan ekonomi. Cenderung warga bersifat individualistik dan bergerak sendiri-sendiri. Terjalannya hubungan dengan pihak luar komunitas membantu komunitas dalam mengatasi kesulitan ekonomi, karena mendapat bantuan uang tunai maupun sembako.

Pada Tabel 1, dapat dilihat bahwa total rata-rata persentase kapasitas adaptasi komunitas sebesar 47%. Angka tersebut didapatkan dari menjumlahkan total rata-rata persentase dari setiap aspek kapasitas adaptasi (*institutional memory*, *innovative learning*, dan *connectedness*) kemudian dibagi dengan jumlah total aspek kapasitas adaptasi. Hasil tersebut menunjukkan kapasitas adaptasi komunitas tergolong rendah. Dapat dikatakan rendah apabila rata-rata persentase kurang dari 70% dan tinggi jika rata-rata persentase lebih dari 70%.

Tabel 1 Rataan persentase berdasarkan tingkat kapasitas adaptasi

Aspek kapasitas adaptasi	Rata-rata persentase (%)
<i>Institutional memory</i>	78,5
<i>Innovative learning</i>	10
<i>Connectedness</i>	52,5
Total rata-rata persentase	47

Sumber : Data primer (diolah) 2020

Komunitas tidak siap dalam menghadapi pandemi Covid-19 terutama dampak akibat pandemi. Ketidaksiapan komunitas dalam menghadapi pandemi, ditunjukkan dengan ketidakmampuan mereka dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi selama pandemi. Belum lagi permasalahan kesulitan ekonomi yang menguncang menyebabkan warga semakin terpuruk karena sebelumnya warga di komunitas merupakan kelompok rentan dengan lapisan sosial menengah ke bawah. Memori bersama yang dimiliki komunitas saat mengalami kesulitan ekonomi di masa lampau tidak dimanfaatkan dengan optimal.

Mereka tidak belajar dari pengalaman untuk membuat gerakan atasi permasalahan bersama, hal tersebut disebabkan oleh berbagai faktor seperti warga memiliki kesibukkan masing-masing dan sifat individualistik dalam mengatasi permasalahan kesulitan ekonomi. Komunitas cenderung mengandalkan dukungan eksternal seperti bantuan dan uang tunai dari pihak luar komunitas karena komunitas memiliki keterhubungan yang baik dengan pihak luar komunitas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya kapasitas adaptasi komunitas miskin di pedesaan menghadapi pandemi Covid-19 mendukung hipotesis penelitian.

### Tindakan Kolektif

Pandemi Covid-19 menyebabkan warga dilanda kesulitan ekonomi sehingga harus segera dibantu dan diselesaikan. Longstaff *et al.* (2010) mengatakan bahwa tindakan kolektif mampu membangun suatu ketahanan (resiliensi) pada komunitas ketika menghadapi bencana. Komunitas sedang menghadapi permasalahan bersama akibat pandemi Covid-19 yang mengguncang perekonomian warga, yaitu kesulitan ekonomi. Permasalahan ini harus segera diatasi dan dicari solusi bersama. Semenjak adanya pandemi Covid-19, komunitas pernah mengadakan kegiatan kolektif yaitu pembuatan handsanitizer bersama. Tujuan diadakannya kegiatan tersebut dengan maksud untuk menaruh handsanitizer di setiap sudut-sudut komunitas dan dibagikan kepada warga. Pembuatan handsanitizer dilakukan oleh warga dengan modal dari iuran warga.

Tabel 2 menunjukkan sebanyak 67,5% responden tidak pernah terlibat dalam pembuatan handsanitizer. Ini menunjukkan bahwa responden tidak begitu tertarik dengan kegiatan tersebut. Tidak terlibatnya warga dalam kegiatan ini, dilandasi berbagai alasan diantaranya tidak memiliki waktu luang, memiliki kegiatan lain, serta tidak begitu tertarik.

Tabel 2 Rataan persentase berdasarkan tingkat aksi kolektif di komunitas

Jenis Kegiatan	Intensitas Kegiatan		Total
	Tidak pernah	Jarang	
	Persentase (%)	Persentase (%)	Persentase (%)
Pembuatan Handsanitizer	67,5	32,5	100

Sumber : Data primer (diolah) 2020

Sedangkan, sebanyak 32,5% responden mengaku jarang mengikuti kegiatan tersebut namun pernah ikut. Saat ditelusuri lebih lanjut, warga tidak begitu tertarik dengan pembuatan handsanitizer mereka mengatakan bahwa produk tersebut jarang

digunakan karena mereka lebih senang mencuci tangan. Selain itu, mereka menjelaskan bahwa produk tersebut dapat dibeli daripada membuatnya membutuhkan waktu dan tenaga.

Namun, kegiatan bersama pembuatan handsanitizer ini tidak berlangsung lama. Penyebab utama dikarenakan warga terbentur dengan dana untuk membeli bahan. Modal dalam pembuatan handsanitizer ini berasal dari iuran warga, sedangkan selama pandemi kondisi perekonomian warga di komunitas menurun sehingga warga enggan dan sulit untuk mengeluarkan iuran. Selain itu, menurut salah satu informan ia mengatakan rendahnya antusiasme warga dalam pembuatan handsanitizer memicu kegiatan ini tidak berlangsung lama.

Dapat disimpulkan bahwa aksi kolektif yang dilakukan oleh warga di komunitas tidak mampu mengatasi permasalahan kesulitan ekonomi yang dialami warga selama pandemi Covid-19. Kegiatan kolektif berupa pembuatan handsanitizer di masa pandemi terlalu dini dan kurang perencanaan sehingga tidak dapat berlangsung lama.

Banyaknya faktor yang menyebabkan rendahnya eksistensi kegiatan tersebut diantaranya kurangnya perencanaan untuk kegiatan, minimnya peran pemimpin sebagai roda penggerak, rendahnya

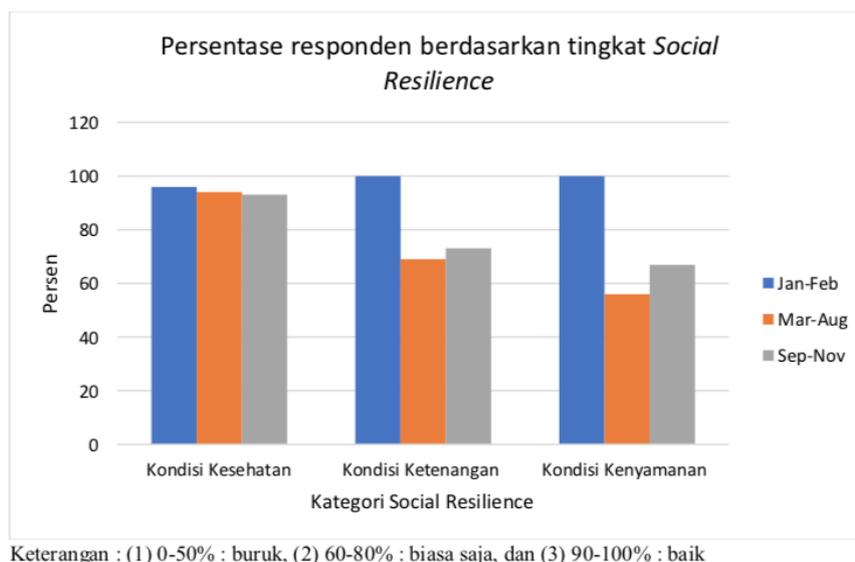
partisipasi warga akibat kesibukkan masing-masing, tidak adanya bantuan dana serta pendampingan dari pihak-pihak luar komunitas. Cenderung warga di komunitas pasrah dengan keadaan dan tidak berniat untuk melakukan suatu gerakan untuk atasi permasalahan. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya aksi kolektif yang dilakukan

komunitas miskin di pedesaan mendukung hipotesis penelitian.

### Resiliensi Komunitas

Pandemi Covid-19 menyebabkan komunitas yang sudah rentan menjadi semakin rentan akibat permasalahan kesulitan ekonomi di masa pandemi. Mengingat komunitas merupakan kelompok rentan dengan lapisan sosial menengah ke bawah. Dalam menghadapi bencana, menurut Longstaff *et al.* (2010) komunitas harus mampu beradaptasi, memiliki pertahanan diri, mengelola stress, dan memiliki kapasitas sosial. Ketahanan komunitas disebut sebagai resiliensi komunitas. Ketahanan komunitas diukur melalui beberapa aspek seperti (1) ketahanan sosial (*social resilience*), (2) ketahanan ekonomi (*economic resilience*) dan (3) keberadaan kelembagaan (*institutional resilience*) yang dilihat dari sebelum hingga selama pandemi Covid-19 (Bulan Januari hingga November 2020).

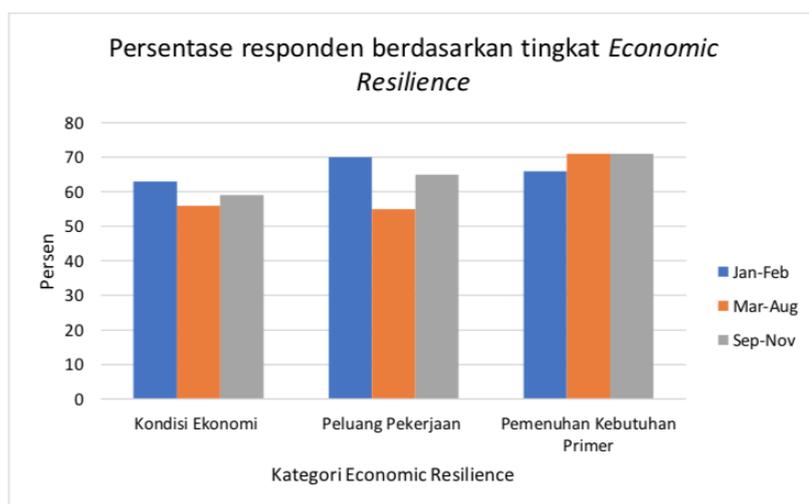
Ketahanan sosial (*social resilience*) mengukur kondisi komunitas yang didasarkan pada dimensi sosial sebelum dan selama masa pandemi Covid-19. Pengukuran dilakukan melalui (1) kondisi kesehatan keluarga, (2) kenyamanan, dan (3) kecemasan. Pengukuran ini menggunakan skala diferensial semantik skala 1 hingga 10. Semakin besar angka yang dipilih responden maka semakin baik keadaannya.



Gambar 1 Rataan persentase aspek *social resilience* di komunitas

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat dari ketiga indikator pengukuran *social resilience*, kondisi kesehatan merupakan indikator yang stabil, sedangkan kondisi ketenangan dan kenyamanan responden mengalami penurunan dari sebelum dan selama pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil wawancara dengan responden, ditemukan hal yang mengganggu ketenangan dan kenyamanan warga ialah massifnya pemberitaan Covid-19 di media massa dan sosial. Ditambah lagi banyaknya berita bohong (hoax) yang beredar di media sosial. Lebih lanjut, warga merasa kejadian besar seperti pandemi Covid-19 yang menyebabkan kekacauan ini kali pertama dirasakan. Warga membutuhkan penyesuaian menghadapi perubahan-perubahan selama pandemi, seperti pembatasan aktivitas, mendampingi anak sekolah dari rumah, dan selalu pakai masker.

Selain itu, aspek lain pembentuk ketahanan komunitas menghadapi pandemi adalah *economic resilience*. Dalam mengukur ketahanan ekonomi dilihat bagaimana (1) kondisi ekonomi keluarga, (2) kondisi pemenuhan kebutuhan sehari-hari, dan (3) peluang pekerjaan sebelum dan selama pandemi Covid-19. Pengukuran *economic resilience* sama dengan *social resilience*, yaitu menggunakan skala diferensial semantik dari 1 hingga 10. Semakin besar angka yang dipilih responden maka kondisi semakin baik.



Keterangan : (1) 0-50% : buruk, (2) 60-80% : biasa saja, dan (3) 90-100% : baik

Gambar 2 Rataan skor aspek *economic resilience* di komunitas

Berdasarkan grafik di atas, dapat dilihat dari ketiga indikator pengukuran *economic resilience*, dua dari tiga indikator mengalami penurunan semenjak adanya pandemi Covid-19. Kedua indikator tersebut ialah kondisi ekonomi dan peluang pekerjaan. Mayoritas warga mengeluhkan perekonomian yang semakin tidak stabil semenjak pandemi akibat beberapa warga kehilangan pekerjaan, terkena PHK, penurunan pendapatan, harga bahan baku mahal, sulitnya mencari pekerjaan yang berujung pada permasalahan bersama, yakni kesulitan ekonomi di komunitas. Adapun kondisi pemenuhan kebutuhan primer mengalami peningkatan selama pandemi, berkat adanya bantuan eksternal dari pihak luar komunitas berupa sembako maupun uang tunai, itu sangat membantu warga dalam memenuhi kebutuhan primer.

Menurut Longstaff *et al.* (2010) keberadaan kelembagaan (*institutional resilience*) termasuk ke dalam komponen pembentuk ketahanan komunitas menghadapi bencana. Kelembagaan dapat diartikan sebagai asosiasi yang terjalin di suatu komunitas. Asosiasi ialah perkumpulan orang yang memiliki kepentingan dan kebutuhan yang sama, sehingga membentuk sebuah tatanan hubungan atau pertalian satu sama lain. Dari tatanan tersebut, maka kelembagaan dapat mengikat individu melalui seperangkat aturan dan norma bagi individu dalam suatu komunitas.

Pada komunitas RT 01/03 Kampung Nyalindung, terjadi asosiasi pada kelompok Kampung Ramah Lingkungan (KRL) Sabilulungan yang bergerak pada bidang lingkungan. Terbentuknya KRL Sabilulungan dijelaskan oleh salah satu informan atas inisiasi perangkat desa di bidang lingkungan saat berkunjung ke komunitas. Ia menantang ketua RW saat itu untuk membentuk KRL karena di Desa Sukamantri belum ada kelompok yang bergerak di bidang lingkungan.

Seiring berjalannya waktu, ketua KRL Sabilulungan mengatakan eksistensi KRL Sabilulungan semakin menurun. Alasannya karena warga memiliki kesibukkan masing-masing sehingga semakin sedikit warga yang masih mau untuk menjalankan kegiatan KRL. Beberapa responden mengakui bahwa setelah setahun berlalu semenjak peresmian KRL Sabilulungan, semangat warga dalam menggerakkan KRL ini menurun. Antusiasme serta partisipasi warga terhadap KRL Sabilulungan tidak sama seperti tahun 2018 ketika KRL Sabilulungan baru diresmikan. Mereka mengungkapkan alasannya beragam, seperti memiliki kesibukkan masing-masing, bosan, capek, dan tidak tertarik lagi.

KRL Sabilulungan			
Eksistensi Kelembagaan		Keterlibatan Pengurus	
Lancar (%)	Tidak Lancar (%)	Aktif (%)	Tidak Aktif (%)
57,5	42,5	50	50

Sumber : Data primer (diolah) 2020

Semenjak adanya pandemi Covid-19 dana yang diberikan dari pihak desa untuk KRL Sabilulungan tak kunjung cair. Terhambatnya dana dari desa dimaklumi oleh pengurus KRL Sabilulungan karena dalam situasi pandemi jauh lebih banyak hal penting yang harus segera diurus dan diselesaikan dengan

bantuan dana dari desa. Selama pandemi, pengurus KRL Sabilulungan berusaha untuk tetap melaksanakan program KRL beberapa diantaranya seperti membersihkan serta memperbaiki lingkungan, menanam tanaman di sekitar komunitas, dan kegiatan senam.

Merujuk pada teori Nasdian *et al.* (2015), proses pelebagaan KRL Sabilulungan baru pada tahap mengakui. Nasdian *et al.* (2015) mengatakan bahwa proses pelebagaan terdiri dari lima tahapan yaitu mengenal, mengakui, menghargai, mentaati, dan menerima segala aturan kelompok. Mereka mengakui bahwa ada sebuah kelompok di komunitas yang bernama KRL Sabilulungan. Namun, kelompok tersebut tidak dapat mengikat warga karena tidak semua warga butuh dengan kelompok yang bergerak di lingkungan. Tujuan dari kelompok tersebut tidak dapat menjawab kebutuhan warga, sehingga warga tidak menjadikan KRL Sabilulungan sebagai suatu hal yang penting, apalagi sampai dijadikan sebuah tatanan perilaku bagi warga di komunitas.

Lebih lanjut, jika ditinjau dari teori empat tingkatan norma merujuk pada Nasdian *et al.* (2015) diantaranya tingkat pertama cara (*usage*), kebiasaan (*folkways*), tata kelakuan (*mores*), dan adat (*customs*) maka dapat digolongkan KRL Sabilulungan berada pada tingkatan cara (*usage*). KRL Sabilulungan menunjukkan bahwa ia berada pada tahap cara karena lebih menonjolkan hubungan antar masing-masing individu. Apabila terdapat suatu penyimpangan di dalam kelompok tersebut, sanksi moral yang diberikan hanya dipandang sebagai suatu yang tidak pantas oleh pelakunya. Penyimpangan tersebut dianggap oleh masyarakat hanya dinilai sebagai sesuatu perbuatan yang dianggap janggal.

Seperti pada Tabel 4, bahwa masih ada warga yang mengatakan bahwa kegiatan KRL tidak lancar dan tidak semuanya warga terlibat aktif. Itu menunjukkan bahwa tidak ada sanksi yang tegas apabila warga tidak ikut kegiatan KRL. Menurut informasi dari informan, apabila ada warga yang berasalan tidak hadir maupun tanpa kabar hanya ditegur saja tidak diberikan sanksi maupun dipandang sebagai suatu yang janggal oleh warga lainnya.

Dengan begitu, dapat disimpulkan bahwa KRL Sabilulungan bukan merupakan suatu kelembagaan di komunitas, melainkan hanya asosiasi individu yang membentuk suatu kelompok yang bergerak di bidang lingkungan. Kelompok tersebut tidak menjadi kebutuhan bersama bagi warga di komunitas, sehingga warga tidak menjadikan KRL sebagai suatu hal yang penting atau wajib diikuti karena merasa tidak butuh dengan kelompok tersebut.

Berdasarkan hasil perhitungan, didapatkan rata-rata persentase *institutional resilience* adalah 46,25% yang mana rata-rata tersebut tergolong rendah. Dikatakan rendah apabila rata-rata persentase kurang dari 70% dan dikatakan tinggi apabila lebih dari 70%. Angka tersebut menunjukkan bahwa kelembagaan di komunitas rendah, padahal sebagaimana teori yang mengatakan bahwa cenderung komunitas di pedesaan guyub, solidaritas tinggi, dan cenderung melakukan suatu aktivitas secara bersama-sama. Namun, pada komunitas Kampung Nyalindung berbeda dan justru cenderung terjadi pelemahan dalam hal kelembagaan.

Melemahnya kelembagaan di komunitas terjadi karena tergerusnya nilai-nilai sosial diantara warga. Sehingga, warga di komunitas merasa tidak perlu menyelesaikan persoalan secara bersama-sama. Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan bahwa cenderung warga enggan menolong antar warga apabila tidak diminta oleh yang bersangkutan. Mereka merasa bahwa tidak ada kewajiban membantu apabila tidak diminta, karena itu merupakan kepentingan individu bukannya kepentingan bersama.

Pada komunitas, nilai yang masih terbangun dengan baik ialah gotong royong. Apabila ada seruan gotong royong dalam membersihkan lingkungan, maka warga akan mengikuti dan merasa segan apabila tidak turut membantu. Perbedaan tolong menolong antar warga dengan gotong royong terletak pada kepentingannya. Gotong royong di komunitas dilakukan karena warga merasa itu adalah kepentingan bersama sehingga hal tersebut mampu mengikat warga dan menjadi landasan sebagai aturan sosial di komunitas.

Aspek resiliensi komunitas	Rata-rata persentase (%)
<i>Social resilience</i>	77,5
<i>Economic resilience</i>	32,5
<i>Institutional resilience</i>	46,25
Total rata-rata persentase	52,08

Sumber : Data primer (diolah) 2020

Dari ketiga aspek pembentuk ketahanan di komunitas yaitu dimensi sosial, ekonomi, dan kelembagaan menunjukkan bahwa ketiganya tidak mampu membangun resiliensi pada komunitas dalam menghadapi pandemi Covid-19. Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara mendalam, cenderung warga masih membangun ketahanan pada level rumah tangga bukan komunitas. Guncangan ekonomi akibat pandemi menyebabkan warga semakin terpuruk, mengingat komunitas adalah kelompok rentan yang memiliki keterbatasan ekonomi sehingga di masa pandemi semakin rentan dan terpuruk. Dalam menghadapi pandemi, warga tidak mampu beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang terjadi. Warga cenderung pasrah dengan tidak melakukan suatu kegiatan kolektif untuk mengatasi permasalahan kesulitan ekonomi di masa pandemi. Selain itu, tidak adanya kelembagaan di komunitas menjadi penyebab tidak terbangunnya ketahanan komunitas dalam menghadapi pandemi Covid-19.

Kelembagaan dapat menjadi sarana dalam membangun keterikatan warga (*bonding*) di komunitas. Namun, hal tersebut rupanya tidak tampak pada komunitas miskin di pedesaan. Tergerusnya nilai-nilai sosial di komunitas miskin di pedesaan menjadikan mereka cenderung individualistik. Melemahnya kelembagaan menjadi salah satu indikator sudah tergerusnya nilai-nilai sosial di komunitas. Tidak ada wadah untuk menampung kebutuhan warga, akibatnya mereka melakukan suatu aktivitas secara mandiri tanpa melibatkan komunitas. Seperti yang terjadi di masa pandemi Covid-19, dimana komunitas tidak mampu membangun ketahanan bersama ketika terjadi guncangan perubahan akibat pandemi.

Selama ini warga di komunitas mampu bertahan menghadapi pandemi Covid-19 cenderung mengandalkan bantuan dari pemerintah maupun yayasan. Bantuan-bantuan yang diberikan baik berupa uang tunai maupun sembako sangat membantu bagi warga di komunitas. Dengan adanya bantuan eksternal seperti itu, ketahanan komunitas terbangun karena dibantu oleh pihak eksternal bukan dari internal komunitas itu sendiri. Seperti halnya pendapat yang diuraikan oleh Samarakoon dan Abeykoon (2018) yang mengatakan bahwa dukungan eksternal dapat berpengaruh terhadap ketahanan (resiliensi) komunitas namun bukan dari anggota komunitas itu sendiri. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa rendahnya resiliensi komunitas mendukung hipotesis penelitian.

## KESIMPULAN DAN SARAN

Kapasitas adaptasi dan aksi kolektif yang rendah menyebabkan rendahnya ketahanan (resiliensi) komunitas dalam menghadapi pandemi Covid-19. Rendahnya kapasitas adaptasi dan aksi kolektif menyebabkan tidak terbangunnya ketahanan (resiliensi) komunitas menghadapi pandemi Covid-19. Cenderung komunitas memiliki perilaku pasrah dengan keadaan sehingga tidak tergerak untuk melakukan gerakan (*movement*) bersama untuk atasi permasalahan kesulitan ekonomi. Adapun ketahanan komunitas dalam menghadapi pandemi, disebabkan dukungan eksternal seperti bantuan sembako dan uang tunai yang diberikan dari pihak luar komunitas.

Diharapkan pemerintah mampu memberikan pembinaan dan pemberdayaan terhadap KRL Sabilulungan agar semakin berkembang dengan baik. Selain itu, komunitas perlu melakukan evaluasi bersama atas kinerja pengurus dan kegiatan yang ada di komunitas, serta bermusyawarah mufakat dalam menentukan sosok pemimpin sebagai roda penggerak warga sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh warga di komunitas.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alamsyah IE. 2020. Akibat Covid-19, Angka Kemiskinan Diprediksi Naik Dua Digit. *17 Juli*.
- Cutter SL, Barnes L, Berry M, Burton C, Evans E, Tate E, Webb J. 2008. A place-based model for understanding community resilience to natural disasters. 18:598–606.doi:10.1016/j.gloenvcha.2008.07.013.
- Iqbal M. 2007. Analisis Peran Pemangku Kepentingan dan Implementasinya Dalam Pembangunan Pertanian. *J Litbang Pertan.* 26(3):89–99.
- Kemertian Kesehatan. 2020. Situasi Covid-19: 01 November 2020.
- Keputusan Presiden. 2020. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 Tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Sebagai Bencana Nasional. *Fundam Nurs.* (01):18=30.
- Longstaff P, Armstrong N, Perrin K, Parker WM, Hidek M. 2010. Building Resilient Communities: A Preliminary Framework for Assessment. *Homel Secur Aff.* 6(3).
- Menteri Ketenagakerjaan. 2020. UMP/UMK Jawa Barat 2020.

- Muhyiddin. 2020. Covid-19, New Normal, dan Perencanaan Pembangunan di Indonesia. *J Perenc Pembang Indones J Dev Plan*. 4(2):240–252. doi:10.36574/jpp.v4i2.118.
- Nasdian FT. 2015. *Sosiologi Umum*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Ridho R. 2020. Menaker Ida Fauziah: 3 Juta Orang Kehilangan Pekerjaan akibat Covid-19. *21 Juli*.
- Samarakoon U, Abeykoon W. 2018. Emergence of Social Cohesion after a disaster: (With reference to two flood affected locations in Colombo District-Sri Lanka). *Procedia Eng*. 212(2017):887–893. doi:10.1016/j.proeng.2018.01.114.
- Sun P, Lu X, Xu C, Sun W, Pan B. 2020. Understanding of COVID-19 based on current evidence. *J Med Virol*. 92(6):548–551. doi:10.1002/jmv.25722.
- Suryahadi A, Al Izzati R, Suryadarma D. 2020. The Impact of COVID-19 Outbreak on Poverty: An Estimation for Indonesia (Draft). *SMERU Work Pap*. April:1–20.
- The Johns Hopkins Coronavirus Resource Center. 2020. COVID-19 Data in Motion: Wednesday, Maret 11, 2020.
- World Health Organization. 2020. Naming the coronavirus disease (COVID-19) and the virus that causes it. *World Heal Organ*.:1.
- Vinson T. 2004. Community Adversity and Resilience: The Distribution of Social Disadvantage in Victoria and New 637 South Wales and The Mediating Role of Social Cohesion. Victoria (AU): Jesuit Social Services.